

ABSTRAK

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi merupakan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan ruang publik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam menertibkan aktivitas PKL yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Jambi berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, seperti rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan personel, dan konflik sosial saat eksekusi penertiban. Meskipun demikian, Satpol PP tetap menjalankan fungsinya melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, serta tindakan represif sebagai upaya terakhir. Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan PKL agar penataan ruang publik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Perda No. 12 Tahun 2016, Kota Jambi

ABSTRACT

The regulation of street vendors (PKL) in Jambi City is an effort by the local government to realize order, beauty, and comfort in public spaces. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of Regional Regulations (Perda) has a strategic role in regulating street vendor activities that violate the provisions. This study aims to examine the role of Satpol PP in regulating street vendors in Jambi City based on Perda Number 12 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that Satpol PP faces various challenges in carrying out its duties, such as low legal awareness of street vendors, limited personnel, and social conflicts during the execution of the regulation. Nevertheless, Satpol PP continues to carry out its functions through a persuasive approach, socialization, and repressive actions as a last resort. The implementation of Perda Number 12 of 2016 requires synergy between the government, the community, and street vendors so that the arrangement of public spaces can run optimally and sustainably. Keywords: Satpol PP, Street Vendors, Order, Regional Regulation No. 12 of 2016, Jambi City

Keywords: Satpol PP, Street Vendors, Order, Regional Regulation No. 12 of 2016, Jambi City